

ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA DINAS TENAGA

KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Oleh :

Nadra Suhaila Lubis

NIM. 0502173448

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)

Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

Nadra Suhaila Lubis

NIM. 0502173448

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadra Suhaila Lubis
NIM : 0502173448
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 16 Juni 1997
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Kapten M. Jamil Lubis Gg. Mangga No. 12

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Medan, September 2021

Yang membuat pernyataan



Nadra Suhaila Lubis

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA UTARA**

Oleh:

NADRA SUHAILA LUBIS

NIM: 0502173448

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelas Sarjana
Akuntansi (S.Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, September 2021

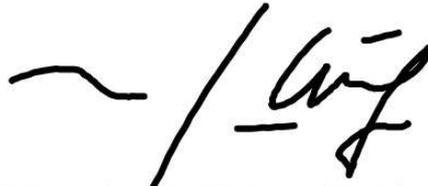
Pembimbing I

Pembimbing II



Tri Inda Fadhila Rahma, S.E.I, M.E.I

NIDN. 2029019101



Arrida Wahyuni Lubis, SE. M.Si

NIDN. 2016068403

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Dr. Yenni Samri Juliati Nasution, SHI. MA

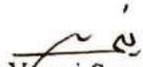
NIDN.2001077903

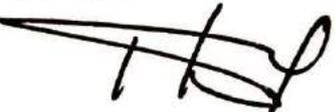
PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara**" atas nama Nadra Suhaila Lubis, NIM 0502173448. Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 26 Oktober 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada prodi Akuntansi Syariah.

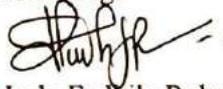
Medan, 26 Oktober 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Akuntansi Syariah UIN-SU
Sekretaris

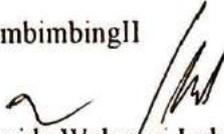
Ketua


Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, M.A
NIDN.2001077903

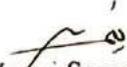

Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIDN.2010057302

Anggota

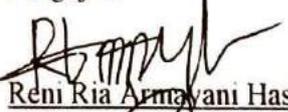
Pembimbing I

Tri Inda Fadhila Rahma, S.E.I.M.E.I
NIDN.2029019101

Pembimbing II

Arnida Wahyuni Lubis, SE, M.Si
NIDN.2016068403

Penguji I

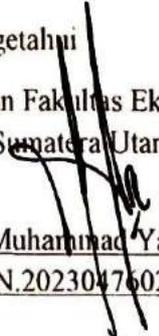

Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, M.A
NIDN.2001077903

Penguji II


Reni Ria Armayani Hasibuan, M.E.I
NIDN.2007098804

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Uin Sumatera Utara


Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN.2023047602

ABSTRAK

Skripsi berjudul “**Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara**” atas nama Nadra Suhaila Lubis. Dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi I oleh Ibu Tri Inda Fadhila Rahma, S.E.I, M.E.I dan Pembimbing II oleh Ibu Arnida Wahyuni Lubis, SE. M.Si.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu instansi pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi. Kinerja merupakan gambaran-gambaran tingkat pencapaian atas pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Untuk melaksanakan kegiatan, pemerintah perlu melakukan perencanaan yang dituangkan dalam bentuk satuan moneter atau yang disebut dengan anggaran. Dengan anggaran yang ada, pemerintah dapat melakukan belanja daerah untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk menilai kinerja anggaran belanja selama lima tahun anggaran yakni tahun 2015-2019. Penilaian kinerja anggaran belanja ini dilakukan untuk mengukur serapan anggaran selama periode anggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja yang terbagi menjadi dua yaitu belanja operasi dan belanja modal, dan rasio efisiensi. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis varians belanja menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sebesar 94%, pada tahun 2016 sebesar 83%, pada tahun 2017 sebesar 91%, pada tahun 2018 sebesar 94% dan pada tahun 2019 sebesar 91%, dari analisis varian belanja kinerja anggaran belanja dapat dikatakan cukup baik, karena tidak ada belanja yang melebihi anggaran. Dari hasil analisis pertumbuhan belanja pada tahun 2015-2019 menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif dengan rata-rata yakni sebesar 10.08%. Dengan nilai maksimal sebesar 46.22% pada tahun 2017 dan nilai minimal sebesar 1.24% pada tahun 2019. Dari hasil analisis keserasian belanja pada tahun 2015-2019 menunjukkan penggunaan anggaran belanja cenderung lebih besar digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal. Dengan rata-rata belanja operasi selama lima tahun anggaran sebesar 99,07% sedangkan belanja modal sebesar 0.93%. Dan dari rasio efisiensi realisasi anggaran pada tahun 2015-2019 tingkat efisiensi penggunaan anggaran dapat dikatakan cukup efisien pada tahun 2016 dan 2019 dengan penggunaan anggaran sebesar 83.42% dan 90.80%, sedangkan ada tahun 2015, 2017-2018 tingkat efisiensi penggunaan anggaran dapat dikatakan kurang efisien dengan penggunaan anggaran sebesar 93.84%, 91.33%, dan 90.80%.

Kata Kunci: Kinerja anggaran belanja, varians belanja, pertumbuhan, keserasian belanja dan efisiensi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara”. Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita. Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar (S.Akun) pada program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai ayahanda Lukman Hakim Lubis dan Ibunda Almh. Khadijah, yang telah memberikan kasih sayang yang sangat tulus, doa, nasihat, serta semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Kemudian kepada kakak saya Najla Charany Lubis serta abang ipar saya Muhammad Joni dan adik tersayang Muhammad Jaky lubis yang telah memberikan semangat, doa serta dukungannya kepada saya.

Penulis juga berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA. selaku rektor Universitas Uslam negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, S.HI, MA. selaku Ketua jurusan Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. Bapak Hendra Harmain, SE, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Tri Inda Fadhila Rahma, S.E.I, M.E.I selaku Pembimbing Skripsi I saya yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan bimbingan, arahan, masukan serta saran-saran yang baik kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Arnida Wahyuni Lubis, SE. M.Si selaku Pembimbing Skripsi II dan selaku Pembimbing Akademik saya yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan bimbingan, arahan, masukan serta saran-saran yang baik kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan mengajari saya dalam kegiatan perkuliahan.
8. Bapak/Ibu Pimian Pegawai Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, khususnya ibu Rini, yang telah membantu memberikan arahan kepada penulis selama melakukan penelitian, Bapak Samuel dan Bang jaya, yang telah memberikan data-data yang dibutuhkan penulis selama melakukan penelitian.
9. Teman-teman sekelas saya AKS B stambuk 2017 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
10. Kepada Sahabat-sahabat saya Zeki Pradana, Auliya Anggina, Hambali Anggara, Edi Sundawa, Diya Sugiarti, Batara Prawira yang telah membantu, memberikan semangat dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha semaksimal untuk memberikan yang terbaik. Namun penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih, dan semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah wawasan.

Wasallamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 21 Agustus 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nadra' with a stylized flourish at the end.

Nadra Suhaila Lubis

NIM. 0502173448

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	8
A. Anggaran Sektor Publik	8
1. Pengertian Anggaran.....	8
2. Anggaran Dalam Perspektif Islam	10
3. Pentingnya Anggaran Sektor Publik	12
4. Fungsi Anggaran	13
5. Prinsip Anggaran.....	15
6. Prinsip Anggaran Dalam Perspektif Islam.....	16
B. Kinerja Sektor Publik.....	17
1. Pengertian Sistem Pengukuran Kinerja.....	17
2. Kinerja Dalam Perspektif Islam	19
3. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja	20
4. Manfaat Pengukuran Kinerja	21
5. Analisis Kinerja Keuangan	22

C. Laporan Keuangan Sektor Publik	30
D. Kajian Terdahulu.....	34
E. Kerangka Pemikiran.....	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Pendekatan Penelitian	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
C. Populasi dan Sampel Penelitian	45
D. Jenis Data Penelitian	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Defenisi Operasional Variabel	46
G. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	51
B. Deskripsi Data.....	64
C. Hasil Penelitian	66
D. Pembahasan.....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran	3
2.1 Kriteria Penilaian Kinerja Varians Belanja.....	23
2.2 Analisis Varians Belanja Pada Dinas X Tahun Anggaran 2012-2014.....	24
2.3 Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja.....	25
2.4 Analisis Pertumbuhan Belanja Pada Dinas X Tahun Anggaran 2012-2014.....	25
2.5 Rasio Belanja Operasi Dinas X Tahun Anggaran 2012-2014	27
2.6 Rasio Belanja Modal Dinas X Tahun Anggaran 2012-2014	28
2.7 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	29
2.8 Rasio Efisiensi Belanja Dinas X Tahun Anggaran 2012-2014.....	29
2.9 Penelitian Terdahulu	34
3.1 Waktu Penelitian	44
3.2 Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja.....	49
3.3 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	50
4.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019.....	64
4.2 Analisis Varians Belanja Tahun Anggaran 2015-2019.....	66
4.3 Analisis Pertumbuhan Belanja Tahun Anggaran 2015-2019.....	68
4.4 Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Tahun Anggaran 2015-2019	69
4.5 Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja Tahun Anggaran 2015-2019	71
4.6 Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2015-2019	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1 Kerangka Pemikiran.....	42
4.1 Logo Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup.....	80
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran memiliki peran penting baik dalam organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Setiap organisasi pada umumnya akan berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Untuk menjalankan tujuan tersebut, suatu organisasi perlu melakukan perencanaan. Didalam organisasi pemerintahan, perencanaan tersebut dituangkan dalam bentuk angka (satuan moneter), atau disebut juga dengan anggaran.

Anggaran sektor publik merupakan perencanaan manajerial untuk tindakan yang dinyatakan dalam istilah-istilah keuangan. Anggaran sektor publik dapat berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah, yaitu melakukan alokasi, distribusi dan stabilisasi.¹ Anggaran yang dibuat merupakan gambaran kinerja yang akan dilakukan selama periode tertentu. Anggaran juga bisa dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan *pertama* rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, *kedua* estimasi besarnya biaya harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut, dan *ketiga* perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut.²

Kinerja merupakan gambaran-gambaran tingkat pencapaian atas pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Kinerja sektor publik adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (menurut PP No. 8/2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan). Pengukuran kinerja ini dilakukan untuk menilai

¹Arfan Ikhsan, et. Al., *Akuntansi Sektor publik* (Medan: Madenatera, 2018), h. 84.

²Deddi Nordiawan, et. Al., *Akuntansi Pemerintahan* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h.

apakah program yang direncanakan berjalan atau tidak, sebagai bentuk pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran, dan untuk mengukur kinerja manajer dalam suatu instansi yang dipimpinnya.³

Pengukuran kinerja ini sangat penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan. Pengukuran kinerja ini juga menunjukkan seberapa efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran. Dengan diadakannya pengukuran kinerja, pemerintah dapat melakukan evaluasi kinerja sehingga bisa dijadikan bahan perbaikan untuk kedepannya⁴.

Pengukuran kinerja ini dapat dilihat dari seberapa besar serapan anggaran yang terlaksana dengan mengukur varians belanja. Untuk melihat seberapa besar pertumbuhan anggaran setiap tahunnya dapat menggunakan analisis pertumbuhan belanja. Untuk pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat dilihat dengan menggunakan analisis keserasian belanja. Analisis ini berfungsi untuk melihat keseimbangan antar belanja. Dan untuk mengukur tingkat penghematan dalam menggunakan anggaran belanja dapat menggunakan rasio efisiensi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu instansi pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara menyusun berbagai program untuk menunjang terlaksananya tugas tersebut.

Pertumbuhan belanja merupakan gambaran tingkat pertumbuhan jumlah belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pertumbuhan belanja ini dapat diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan belanja. Rasio pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui apakah kinerja anggaran pemerintah mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Pertumbuhan belanja pada umumnya cenderung mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian terhadap tingkat inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja

³Arfan Ikhsan, et. Al., *Akuntansi Sektor publik* (Medan: Madenatera, 2018), h. 298.

⁴Arnida Wahyuni Lubis, *Diktat Audit Kinerja Sektor Publik*, Medan, 2018

dapat dikatakan positif apabila pertumbuhan belanja mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan pertumbuhan belanja dapat dikatakan negatif apabila pertumbuhan belanja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Walaupun pertumbuhan anggaran dapat dikatakan positif apabila pertumbuhan belanja mengalami kenaikan, pemerintah tetap harus melakukan penghematan dalam penggunaan anggaran. Penghematan dalam penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah dapat diukur dengan menggunakan rasio efisiensi anggaran. Rasio efisiensi anggaran menggambarkan seberapa besar tingkat penghematan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penggunaan anggaran. Pemerintah dapat dikatakan efisien dalam penggunaan anggaran apabila rasio efisiensinya kurang dari 100%. Jika rasio efisiensi mencapai 100%, maka pemerintah dapat dikatakan belum melakukan penghematan dalam penggunaan anggaran.

Berikut ini adalah laporan realisasi anggaran belanja daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2015-2019.

Tabel 1.1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

Dinas Tenaga Kerja provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019

Tahun	Anggaran	Realisasi
2015	32.906.624.850	30.879.816.399
2016	38.340.159.000	31.983.868.678
2017	51.205.294.000	46.765.731.082
2018	53.163.458.948	50.074.261.993
2019	54.462.365.423	49.453.131.346

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

Dari data laporan keuangan tersebut, dapat dilihat bahwa, anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan, sedangkan realisasi mengalami fluktuasi, atau tidak tetap. Pada tahun 2015 anggaran sebesar 32.906.624.850 dan realisasi sebesar 30.879.816.399 dengan selisih 2.026.808.451. Pada tahun 2016 anggaran

sebesar 38.340.159.000 dan realisasi sebesar 31.983.868.678 dengan selisih sebesar 6.356.290.322. Pada tahun 2017 anggaran sebesar 51.205.294.000 dan realisasi sebesar 46.765.731.082 dengan selisih sebesar 4.439. 562.918. Pada tahun 2018 anggaran sebesar 53.163.458.948 realisasi anggaran sebesar 50.074.261.993 dengan selisih sebesar 3.089.196.955. Pada tahun 2019 anggaran sebesar 54.462.365.423 dan realisasi anggaran sebesar 49.453.131.346 dengan selisih anggaran sebesar 5.009.234.077. Dan dari laporan keuangan tersebut dapat dilihat bahwa anggaran belum terserap sepenuhnya.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Kiki Muryanti (2017) dengan judul analisis Analisis realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri selama tahun anggaran 2011-2015 dapat dikatakan sangat efektif, yaitu dengan memiliki rasio efektivitas rata-rata di atas 100%. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri selama tahun anggaran 2011-2015 dapat dikatakan efisien dalam mengelola anggaran keuangan daerah dengan menunjukkan adanya penurunan tingkat efisiensi yang mengindikasikan telah dilakukan perbaikan kinerja oleh pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sartika dengan judul analisis Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan realisasi anggaran belanja pada instansi Bappeda Provinsi Sumatera utara tahun 2014-2016 terus mengalami perubahan.pertumbuhan belanja pada pada tahun anggaran 2015/2016 menunjukkan adanya pertumbuhan belanja yang cukup efisien. Hasil pengukuran tingkat efisiensi anggaran belanja pada tahun 2014-2016 dengan menggunakan analisis varians belanja menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran selama tahun anggaran, karena tidak melebihi target anggaran pada periode tersebut. Hasil ananlisis keserasian belanja Bappeda provinsi Sumatera Utara lebih memprioritaskan anggaran pada belanja

operasinya daripada belanja modal, hal ini menunjukkan Bappeda provinsi Sumatera Utara lebih mengoptimalkan pelaksanaan jalannya pemerintahan, sedangkan untuk pembangunan daerahnya masih sangat kecil. Dan penelitian yang dilakukan oleh Sri Hartinah dengan judul analisis Analisis Anggaran Belanja Modal Sebagai Alat Pengendalian Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan realisasi anggaran belanja modal pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara Tahun 2014-2017 belum habis direalisasikan dan kurang efektif. Realisasi anggaran belanja modal pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara belum mencapai target. Dan fungsi anggaran sebagai alat pengendalian belanja belum dijalankan dengan baik.

Terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu. Yakni pada penelitian yang dilakukan oleh Kiky Muryanti lebih berfokus pada analisis efektifitas dan efisiensi untuk menilai kinerja pemerintah. Sedangkan pada penelitian ini peneliti meneliti kinerja anggaran belanja. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sartika terletak pada obyek penelitian dan tahun penelitian. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan yang dilakukan Sri Hartinah yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Sri Hartinah berfokus pada penelitian anggaran belanja modal saja. Sehingga rasio yang dijugakan juga berbeda dalam pengukuran kinerja anggaran belanja.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, dapat diidentifikasi masalahnya yaitu:

1. Anggaran belanja pada Dinas Tenaga kerja dan Trasnigrasi Provinsi Sumatera Utara selama lima tahun berturut dimulai dari tahun 2015-

2019 terus mengalami peningkatan namun realisasi mengalami penurunan pada tahun 2019.

2. Tingkat efisiensi belanja pada tahun 2015, 2017-2018 masih kurang efisien.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar varians belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2015-2019?
2. Seberapa besar pertumbuhan belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2015-2019?
3. Seberapa besar keserasian belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2015-2019?
4. Seberapa besar efisiensi belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2015-2019?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui varians belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2015-2019.
- b. Untuk mengetahui pertumbuhan belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2015-2019.
- c. Untuk mengetahui keserasian belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2015-2019.
- d. Untuk mengetahui rasio efiseiensi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2015-2019.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a) Bagi penulis

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan khususnya mengenai Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada kantor Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Sumatera Utara.

b) Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam menganalisis kinerja anggaran belanja tahun 2015-2019 pada Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Sumatera Utara.

c) Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah referensi mengenai Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Sumatera Utara.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Anggaran Sektor Publik

1. Pengertian Anggaran

Perencanaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses manajemen organisasi. Anggaran juga memiliki posisi yang sangat penting. Anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Pemikiran strategis setiap organisasi adalah proses dimana manajemen berfikir tentang pengintegrasian aktivitas kearah tujuan organisasi. Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi, dan ekonomi eksternal, manajemen akan didorong untuk menyusun strategi. Pemikiran strategis manajemen didokumentasikan dalam dokumen perencanaan. Keseluruhan proses diintegrasikan dalam prosedur penganggaran organisasi.¹

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.² Sedangkan penganggaran merupakan aktivitas yang terus-menerus dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pemeriksaan. Proses ini dikenal sebagai siklus anggaran (*budget cycle*).³ Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahap yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta yang relatif kecil nuansa politisnya. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun untuk dikritik, disikusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrument

¹Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Jakarta: Erlangga, 2006), h.

² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 121.

³Bahtiar Arif, *et. al., Akuntansi Pemerintahan* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 15.

akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.⁴

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/beanja) dan berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan). Dari pengertian anggaran tersebut, dapat dilihat bahwa anggaran memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan.
- b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satuan atau beberapa tahun.
- c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- d. Usulan anggaran telah disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
- e. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.⁵

Proses penyusunan anggaran melibatkan berbagai pihak, baik manajer tingkat atas maupun manajer tingkat bawah. Para menejer akan memainkan peran dalam mempersiapkan dan mengevaluasi berbagai alternatif dari

⁴Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 121.

⁵Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*,(Jakarta: Erlangga, 2006), h.

tujuan anggaran, ketika anggaran digunakan sebagai tolok ukur kinerja manajer. Pada dasarnya penyusunan anggaran dibagi menjadi dua yaitu penganggaran partisipatif (bottom-up) yang disusun dengan memberikan kesempatan bagi manajer level bawah untuk berpartisipasi dalam pembentukan anggaran dan penganggaran top-down, yang disusun dengan tidak melibatkan partisipasi bawahan secara signifikan. Dalam proses penyusunan anggaran di dalam suatu organisasi dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang. Anggaran yang disusun harus memiliki tolok ukur kinerja yang hendak dicapai. Hal ini dikarenakan anggaran menggambarkan kinerja yang akan dilaksanakan demi tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan.⁶

2. Anggaran Dalam Perspektif Islam

Anggaran di dalam Al-quran terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia memerintahkan hamba-hambanya untuk berbuat adil, yakni dengan mengambil sikap tengah dan penuh keseimbangan, serta menganjurkan untuk berbuat kebaikan.⁸ Jika dikaitkan kaitkan dengan anggaran, dalam

⁶Abdul Kadir Arno, "Penyusunan Anggaran Perspektif Fiqhi Anggran Hukum Ekonomi Syariah" dalam *Jurnal Islamic Economic Law*, Vol. 1 No.1, September 2016, h. 31.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung:Al-Hambra,2014), h. 277.

⁸Abdullah, *Tafsir Ibnu katsir Jilid 5*,(Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003),h. 96.

penyusunan anggaran hendaklah berlaku adil, tidak memihak kepada siapapun, agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا ءِ أَنْ قَوْمٍ

عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁹

Pada Surah tersebut Allah berfirman, “*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah*”. Maksudnya adalah jadilah kalian sebagai penegak kebenaran karena Allah bukan karena manusia atau mencari popularitas, dan jadilah kalian “*Saksi dengan adil*”. Maksudnya secara adil, bukan secara curang. “*Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorongmu untuk berlaku tidak adil*”. Maksudnya, janganlah kebencian kepad suatu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil terhadap mereka, tetapi terapkanlah keadilan itu kepada setiap orang, baik itu teman maupun musuh kalian. Oleh karena itu Allah berfirman “*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa*”. Maksudnya, keadilan itu lebih dekat kepada takwa daripada meninggalkannya. Dan selanjutnya Allah berfirman “*Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*”. Maksudnya, Allah akan

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan Terjemahannya (Bandung:Al-Hambra,2014), h. 108.

memberikan balasa kepada kalian berdasarkan ilmu-Nya terhadap perbuatan yang kalian kerjakan, jika baik akan dibalas dengan kebaikan, dan jika buruk maka akan dibalas dengan keburukan pula.¹⁰

Dari tafsir ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu menegakkan kebenaran dan berbuat adil dalam segala hal. Termasuk dalam penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran harus dilakukan secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat demi terwujudnya keseimbangan individu dan masyarakat.¹¹

3. Pentingnya Anggaran Sektor Publik

Tidak semua aspek kehidupan masyarakat tercakup oleh anggaran sektor publik terdapat beberapa aspek kehidupan yang tidak tersentuh oleh anggaran sektor publik, baik skala nasional maupun lokal. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara layak. Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut. Anggaran merupakan blue print keberadaan sebuah negara dan merupakan sebuah arahan dimasa yang akan datang¹². Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu:

- a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan social-ekonomi, menjalin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Anggar diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya

¹⁰Abdullah, *Tafsir Ibnu katsir Jilid 3*,(Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003),h. 45-56.

¹¹Abdul Kadir Arno, "Penyusunan Anggaran Perspektif Fiqhi Anggran Hukum Ekonomi Syariah" dalam *Jurnal Islamic Economic Law*, Vol. 1 No.1, September 2016, h. 36.

¹²Ihyaul Ulum MD, *Akuntansi Sektor Publik* (Malang: UMM Press, 2008), h. 100.

masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choise*), dan *trade offs*.

- c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran public merupakan instrume pelaksanaan akuntabilitas pubik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

4. Fungsi Anggaran

Anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

a. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan

Sebagai alat perencanaan, anggaran dibuat untuk merencanakan tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang akan diperoleh melalui belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- 1) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan
- 2) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta merencanakan alternative sumber pembiayaannya.
- 3) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan
- 4) Menentukan indicator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

b. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian

Anggaran sebagai instrument pengendali digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar, pengeluaran terlalu rendah, dan sasaran atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya. Anggaran merupakan alat untuk mengawasi kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.

c. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran sektor publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi.

d. Anggaran Sebagai Alat Politik

Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana untuk kepentingan tertentu. Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tertentu.

e. Anggaran Sebagai Alat Kordinasi dan Komunikasi

Melalui anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus yang dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian unit kerja lainnya.

f. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja

Anggaran sebagai alat penilaian kinerja merupakan suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksana aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

g. Anggaran Sebagai Alat Motivasi

Anggaran digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

h. Anggaran Sebagai Alat untuk menciptakan Ruang Publik

Anggaran dalam fungsi ini hanya berlaku pada organisasi sektor publik, karena pada organisasi sektor swasta anggaran merupakan dokumen rahasia yang tertutup untuk publik.¹³

¹³Arfan Ikhsan, *et. al.*, *Akuntansi Sektor publik* (Medan: Madenatera, 2018), h. 57.

5. Prinsip Anggaran

Dalam suatu anggaran sektor publik, pentingnya peranan dan fungsi anggaran memerlukan prinsip-prinsip anggaran sebagai pedoman bagi organisasi publik dan atau pemerintah dalam penyusunannya. Adapun prinsip dalam penganggaran sektor publik adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Otorisasi Oleh legislatif

Setiap pengajuan anggaran publik untuk kegiatan operasional pemerintahan, anggaran harus terlebih dahulu mendapat otorisasi dari legislatif sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

b. Prinsip Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana *non-budgetir* pada dasarnya adalah menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.

c. Prinsip Keutuhan Anggaran

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*).

d. Prinsip Nondiscretionary Appropriation

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif.

e. Prinsip Periodik

Anggaran yang disusun harus merupakan suatu proses yang periodik, maksudnya bahwa anggaran tersebut harus berkala yaitu dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan.

f. Prinsip Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan dana yang tersembunyi (*hidden reserve*) yang dapat dijadikan sebagai pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran.

g. Prinsip Jelas

Anggaran yang disusun hendaknya diungkapkan secara sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan. Kejelasan anggaran merupakan salah satu bentuk dari wujud transparansi publik.

h. Prinsip Diketahui Publik

Anggaran yang disusun untuk tahun berjalan harus diinformasikan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat tahu anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang berjalan periode tertentu.¹⁴

6. Prinsip Anggaran Dalam Perspektif Islam

Dalam pelaksanaan anggaran hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip anggaran tersebut agar terciptanya transparansi anggaran. Prinsip transparansi anggaran terdapat didalam Al-Quran surah Asy Syura ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ٣٨

Artinya: *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.*¹⁵

Pada Ayat tersebut Allah SWT berfirman “*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat*”. Yakni mengikuti Rasul-Nya, menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. “*Dan mendirikan shalat*” shalat merupakan ibadah terbesar kepada Allah. “*sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka*”. Yaitu, mereka tidak menunaikan suatu urusan hingga mereka

¹⁴*Ibid.*, h. 63.

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Al-Hambra, 2014), h. 487.

bermusyawarah agar mereka saling dukung-mendukung dengan pendapat mereka seperti dalam peperangan dan urusan sejenisnya. “*Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka*”. Hal itu dilakukan dengan berbuat baik kepada para makhluk Allah, dari mulai kerabat dan orang-orang terdekat setelahnya.¹⁶

Kata *musyawarah* menunjukkan dalam pelaporan anggaran harus diumumkan dan dilaporkan dengan jelas dihadapan umum. Karena anggaran bukan hanya demi kepentingan pribadi, melainkan demi kepentingan umum. Ayat tersebut menjelaskan transparansi anggaran adalah wajib. Hal ini berkaitan dengan sifat amanah dalam mengelola anggaran. Amanah sendiri berkaitan dengan komitmen untuk mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran sesuai dengan alokasinya. Kejujuran dalam mengelola anggaran merupakan suatu kewajiban agar dapat dipertanggung jawabkan.

B. Kinerja Sektor Publik

1. Pengertian Kinerja

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.¹⁷

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program atau kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan

¹⁶ Abdullah, *Tafsir Ibnu katsir Jilid 7*,(Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2003),h. 259

¹⁷Muhamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Pubik* (Yogyakarta:BPFE, 2009), h. 25.

sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan.¹⁸ Pengukuran kinerja ini dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran, dan untuk mengukur kinerja manajer dalam suatu instansi yang dipimpinnya. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga hal berikut, *pertama* pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintahan. Ukuran kinerja yang dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus kepada tujuan dan sasaran program unit kerja, hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi sektor publik. *Kedua* ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.¹⁹

Organisasi pada umumnya diturunkan dari perencanaan strategis, yaitu dimulai dari visi dan misi, falsafah dan kebijakan. Selanjutnya perumusan tujuan, sasaran, penyusunan program dan anggaran serta penetapan tugas dan fungsi harus mengacu pada perencanaan strategis yang sudah ditetapkan.²⁰

¹⁸ Deddi Nordiawan dan Ayuningtiyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik edisi 2* (Jakarta:Salemba Empat, 2006).h. 158.

¹⁹Arfan Ikhsan, et. Al., *Akuntansi Sektor publik* (Medan: Madenatera, 2018), h. 298.

²⁰Paramitha Sandy Mokodompit, dkk, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu" *dalam Jurnal EMBA*. Vol 2 No.2, Juni 2014, h. 1522.

2. Kinerja Dalam Perspektif Islam

Kinerja dalam pandangan Islam terdapat pada surah Al- Ahqaf ayat 19 dan surah An-Nahl ayat 97.

Surah Al-Ahqaf ayat 19

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ^{١٩}

Artinya: *Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.*²¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Artinya, jika seseorang melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik, maka pasti akan mendapatkan hasil yang baik pula dan sebaliknya. Jika kita kaitkan dengan kinerja, maka jika seseorang melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik, maka akan mendapatkan hasil yang baik pula bagi organisasinya dan akan menunjukkan kinerja yang baik terhadap organisasinya.

Surah An-Nahl Ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^{٩٧}

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*²²

²¹Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya (Bandung:Al-Hambra,2014), h. 504

²²Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya (Bandung:Al-Hambra,2014), h. 278.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa janji Allah Ta'ala bagi orang yang mengerjakan amal shalih, yaitu amal yang mengikuti kitab Allah Ta'ala (Al-Qur'an) dan Sunnah Nabi-Nya, Muhammad, Baik laki-laki maupun perempuan yang hatinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya . Amal yang diperintahkan itu telah disyari'atkan dari sisi Allah, yaitu Dia akan memberinya kehidupan yang baik di dunia dan akan memberikan balasan diakhirat kelak dengan balasan yang lebih baik daripada amalnya. Kehidupan yang baik itu mencakup seluruh bentuk ketenangan, bagaimanapun wujudnya.²³

Penilaian kinerja penting dilakukan untuk mengevaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan manajer publik dalam melaksanakan kegiatan dan fungsi yang diamanahkan kepadanya sebagaimana visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik.²⁴

3. Tujuan Sistem Pengukuran kinerja

Secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja adalah:

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down dan bottom up*).
- b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri pencapaian perkembangan pencapaian strategi.
- c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan memotivasi untuk mencapai *goal congruence* .

²³Abdullah, *Tafsir Ibnu katsir Jilid 5*,(Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003),h. 103.

²⁴Marchelino Daling, "Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara" *dalam Jurnal EMBA*. Vol 1 No. 3, September 2013, h. 84.

- d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

4. Manfaat Pengukuran Kinerja

Adapun manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.²⁵

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Hal ini berguna untuk melihat sejauh mana suatu organisasi menjalankan fungsinya atau untuk mengetahui bagaimana sebuah program dijalankan. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja sektor publik sangatlah penting

²⁵Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 122.

karena bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial.²⁶

5. Analisis Kinerja Keuangan

Analisis kinerja keuangan bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah, mengukur potensi mendapatkan atau sumber ekonomi, mengetahui posisi keuangan, mengetahui kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, dan menyakini bahwa pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan adalah dengan rasio keuangan yaitu analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, dan rasio efisiensi.

a. Analisis Varians Belanja

Analisis Varians Belanja Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi dengan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang biasa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya.²⁷

Analisis Varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang di anggarakan. Biasanya selisih anggaran sudah di informasikan dalam laporan realisasi anggaran yang sudah disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan.²⁸

²⁶Mega Oktavia Ropa, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan" dalam *Jurnal EMBA*, Vol 4 No. 2, Juni 2016, h. 739.

²⁷Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: UPP STM YKPN, ed. 2, 2010), h. 157.

²⁸Elizar Sinambela dan Kiki Rizki Ana Pohan, "Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada pemerintahan provinsi Sumatera Utara" dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol 16 No. 1, Maret 2016.

Untuk mengetahui berapa besaran antara realisasi dengan anggaran dapat menggunakan rumus:

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Tabel 2.1

Kriteria Penilaian Kinerja Varians Belanja

Kriteria Varians Belanja	Ukuran
Baik	Realisasi Belanja \leq Anggaran Belanja
Kurang Baik	Realisasi Belanja \geq Anggaran Belanja

Hasil analisis dari varians belanja dapat dikatakan baik jika hasil dari varians belanja tidak melebihi dari anggaran belanja. Dan dapat dikatakan kurang baik jika realisasi belanja melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

Selisih realisasi belanja yang dianggarkan yang cukup signifikan bisa memberikan dua kemungkinan, pertama hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran. kedua justru sebaliknya, jika terjadi selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan karena ada program atau kegiatan yang tidak dilaksanakan eksekutif padahal sudah diamanahkan dalam anggaran.²⁹

Berikut ini merupakan contoh analisis varians belanja pada Dinas X.
Rumus Menghitung Varians Belanja:

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

²⁹Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, ed. 2, 2010), h. 157.

Tabel. 2.2

Analisis Varians Belanja Pada Dinas X Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Varians Belanja	Persentase (%)
2012	25.830.222.872	22.777.417.675	(3.052.805.197)	88%
2013	27.289.839.125	25.031.943.444	(2.257.895.681)	91%
2014	30.344.435.789	28.908.765.342	(1.435.670.447)	95%

Pada tabel 2.2 dapat dilihat bahwa kinerja Dinas X diukur dengan menggunakan analisis varians belanja dapat dikatakan baik, dikarenakan tidak ada realisasi belanja yang melebihi dari yang ditargetkan. Namun realisasi anggaran belum mencapai 100%, hal ini menunjukkan anggaran belum terserap sepenuhnya.

b. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi (kenaikan jumlah uang beredar atau kenaikan likuiditas dalam sebuah perekonomian)³⁰, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapat yang seimbang.³¹ Pertumbuhan belanja dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thn}_t = \frac{\text{realisasi belanja tahun } t - \text{realisasi belanja tahun } t-1}{\text{realisasi belanja tahun } t-1} \times 100\%$$

³⁰ Tri Indah Fadhila Rahma, "Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Bagi Hasil Bank Syariah Di Indonesia", *dalam jurnal j-EBIS*, Vol 3 No. 1, April 2018, h. 5

³¹ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, ed. 2, 2010), h.160.

Tabel 2.3

Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja

Kriteria Pertumbuhan Belanja	Ukuran
Naik	Positif
Turun	Negatif

Berikut ini merupakan contoh analisis pertumbuhan belanja pada Dinas X. Rumus Perhitungan Analisis Pertumbuhan Belanja:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thn}_t = \frac{\text{realisasi belanja tahun } t - \text{realisasi belanja tahun } t-1}{\text{realisasi belanja tahun } t-1} \times 100\%$$

Tabel 2.4

Analisis Pertumbuhan Belanja Pada Dinas X Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Pertumbuhan Belanja	Persentase (%)
2011	20.289.907.217	-	0.00
2012	22.777.417.675	2.487.510.458	12.25%
2013	25.031.943.444	2.254.525.769	9.89%
2014	28.908.765.342	3.876.821.898	15.48%

Hasil analisis menunjukkan pertumbuhan belanja Dinas X yang terjadi selama periode anggaran tahun 2012-2014 yaitu sebesar 12.25%, 9.89%, 15.48%.

c. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat

harmonisasi belanja.³² Rasio ini menggambarkan prioritas pemerintah daerah dalam mengalokasikan dananya pada belanja operasional atau belanja modal. Belum ada standar yang pasti mengenai besarnya rasio belanja operasional maupun modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Analisis keserasian belanja antara lain berupa:

a. Analisis Belanja Operasi

Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin dan berulang (recurrent). Pada umumnya porsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah yaitu antara 60-90%. Pemerintah daerah yang memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah. Rumus rasio belanja operasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Berikut ini merupakan contoh analisis rasio belanja operasi pada Dinas X.

³²*Ibid.*, h. 162.

Tabel 2.5
Rasio Belanja Operasi Pada Dinas X Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja	Persentase (%)
2012	21.012.417.675	22.777.417.675	92,25%
2013	23.053.267.455	25.031.943.444	92,10%
2014	26.398.979.442	28.908.765.342	91,31%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui penggunaan anggaran untuk belanja operasi pada tahun anggaran 2012-2014 sebesar 92,25%, 92,10%, dan 91,31%. Penggunaan anggaran untuk belanja operasi cukup besar. Hal ini menunjukkan penggunaan anggaran didominasi oleh belanja operasi.

b. Analisis Belanja Modal

Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pengeluaran untuk belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan jangka panjang, belanja modal juga bersifat rutin.³³ Umumnya, porsi belanja modal dengan belanja daerah yaitu 5-20%. Rumus rasio belanja modal adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Berikut ini merupakan contoh analisis rasio belanja modal pada Dinas X

³³*Ibid.*, h. 164.

Tabel 2.6
Rasio Belanja Modal Pada Dinas X Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja	Persentase (%)
2012	1.765.000.000	22.777.417.675	7.75%
2013	1.978.675.989	25.031.943.444	7.90%
2014	2.509.785.900	28.908.765.342	8.69%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui penggunaan anggaran untuk belanja modal pada tahun anggaran 2012 sebesar 7,75%, pada tahun 2013 sebesar 7.90% dan pada tahun 2014 sebesar 8.69%.

d. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolute, tetapi relatif. Artinya, tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah lebih efisien dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah daerah di nilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengidentifikasi terjadinya pemborosan anggaran.

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya (spending well). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit

organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan.³⁴ Rumus Rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efisiensi penilaian kinerja keuangan sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 690.900.327 tahun 1996 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% keatas	Tidak Efisien
90-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Keputusan Mendagri No.690.900.327 tahun1996

Berikut ini merupakan contoh analisis rasio efisiensi pada Dinas X

Tabel 2.8
Rasio Efisiensi Belanja Pada Dinas X Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Persentase (%)
2012	22.777.417.675	25.830.222.872	88.18%
2013	25.031.943.444	27.289.839.125	91.72%
2014	28.908.765.342	30.344.435.789	95.26%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 tingkat penggunaan efisiensi belanja dapat dikategorikan cukup efisien,

³⁴Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*,(Yogyakarta: Andi, 2009), h. 132.

pada tahun 2013-2014 tingkat efisiensi belanja dapat dikategorikan kurang efisien.

C. Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan. Informasi keuangan berfungsi untuk memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan.³⁵

Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban pimpinan atau manajer atas pelaksanaan anggaran. Laporan keuangan yang disusun berisikan informasi atas transaksi-transaksi yang terjadi. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi, efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketentuannya terhadap peraturan perundang-undangan.³⁶ Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara sfesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya, dengan:

³⁵Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*,(Yogyakarta: Andi, 2002), h. 159.

³⁶Grace Yunita Liando dan Ingriani Elim, “Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe” *dalam Jurnal EMBA*, Vol 4 No. 1, Maret 2016, h. 1474.

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan entitas dana pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- c. Menyediakan informasi mengenai kataatan realisasi terhadap anggarannya.
- d. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- f. Menyediaka informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.³⁷

Tujuan pelaporan keuangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP No.71 Tahun 2010 yaitu:

- a. Menyediaka informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai kecakupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai .
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pemungutan pajak dan penerimaan.

³⁷Erlina, et. al., *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 20.

- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.³⁸

PP no.71 Tahun 2010 tentang SAP mengidentifikasi komponen laporan keuangan pokok yang perlu disajikan pemerintah adalah Laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan perubahan saldo anggaran lebih (laporan perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Secara garis besar, laporan keuangan pemerintah dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a. pelaksanaan Anggaran (*Budgetary Report*)
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran
 - 2) Laporan perubahan SAL
- b. Laporan Finansial (*Financial Report*)
 - 1) Neraca
 - 2) Laporan operasional
 - 3) Laporan perubahan ekuitas
 - 4) Laporan arus kas
- c. Catatan atas laporan Keuangan³⁹

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar, sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat atau daerah) yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggaran dalam satu periode tertentu.⁴⁰ Tujuan laporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat pencapaian atas target-target yang telah

³⁸*Ibid.*, h. 96.

³⁹Erlina dan Rasdianto, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*, (Medan: Brama Ardian, 2013), h. 23.

⁴⁰Arfan Ikhsan, et. al., *Akuntansi Sektor publik*, (Medan: Madenatera, 2018), h. 147.

ditetapkan. Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menunjukkan unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Adapun manfaat dari laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelapor yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut sangat berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomis, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomis dan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh dan berguna dalam evaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.
- b. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.⁴¹

⁴¹Nurlan Darise, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Indeks, 2008), h. 96

D. Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.9
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis Data	Hasil
1.	Kiky Muryanti (2017)	Analisis realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015	Metode Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri selama tahun anggaran 2011-2015 dapat dikatakan sangat efektif, yaitu dengan memiliki rasio efektivitas rata-rata di atas 100%. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri selama tahun anggaran 2011-2015 dapat dikatakan efisien dalam mengelola anggaran keuangan daerah dengan menunjukkan adanya

				penurunan tingkat efisiensi yang mengindikasikan telah dilakukan perbaikan kinerja oleh pemerintah daerah.
2.	Dewi Sartika (2018)	Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara	Metode Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan realisasi anggaran belanja pada instansi Bappeda Provinsi Sumatera utara tahun 2014-2016 terus mengalami perubahan.pertumbuhan belanja pada pada tahun anggaran 2015/2016 menunjukkan adanya pertumbuhan belanja yang cukup efisien. Hasil pengukuran tingkat efisiensi anggaran belanja pada tahun 2014-2016 dengan menggunakan analisis varians belanja menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran selama tahun anggaran, karena tidak melebihi target anggaran pada periode tersebut.

				<p>Hasil ananlisis keserasian belanja Bappeda provinsi Sumatera Utara lebih memprioritaskan anggaran pada belanja operasinya daripada belanja modal, hal ini menunjukkan Bappeda provinsi Sumatera Utara lebih mengoptimalkan pelaksanaan jalannya pemerintahan, sedangkan untuk pembangunan daerahnya masih sangat kecil.</p>
3.	Tri Marlina Naully (2019)	<p>Analisis Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Sekretarian DPRD Provinsi Sumatera Utara</p>	<p>Metode Deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja daerah Pada Sekretariat DPR Provinsi Sumatera Utara belum mencapai target hal ini disebabkan karena adanya kendala yang dihadapi saat realisasi belanja daerah adalah apabila ada rasionalisasi atau pengurangan anggaran untuk digeser ke anggaran berdasarkan kebijakan Pemprov-SU dalam hal</p>

				<p>ini kepala daerah. Hasil analisis varians belanja tahun anggaran 2014-2018 menunjukkan kinerja belanja dinilai kurang efektif dan pemerintah terus melakukan perbaikan dalam pemanfaatan realisasi belanja. Hasil analisis belanja operasi menunjukkan bahwa belanja daerah mengalami peningkatan dan rasio belanja operasi mengalami peningkatan. analisis belanja modal terhadap total belanja daerah menunjukkan bahwa belanja daerah mengalami peningkatan, namun rasio belanja modal mengalami penurunan dan analisis efisiensi total belanja daerah menunjukkan bahwa efisiensi belanja daerah dapat di katagorikan cukup efisien</p>
--	--	--	--	--

4.	Rusdi (2018)	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemrintah Daerah Kabupaten Enrekang	Metode Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektif pendapatan dari pemerintah Kab. Enrekang T.A 2015-2017 belum mencapai target namun sudah mencapai kategori efektif. Tingkat efisiensi belanja dari pemerintah Enrekang pada tahun 2015-2017 pemerintah dinilai mampu menghemat, anggaran belanja dengan sangat efisien hal ini dapat dilihat dari tidak adanya angka yang melebihi anggaran belanja.
5.	Sakina Nusafira Tantri dan Putri Irmawati (2018)	Analisis kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012- 2016, Jurnal Akuntansi Terapan	Metode Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis varians belanja Dinas Kebudayaan DIY tahun 2012-2016 menunjukkan kinerja yang baik, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya realisasi anggaran yang melebihi dari anggaran belanja. Hasil analisis pertumbuhan belanja dapat dikatakan

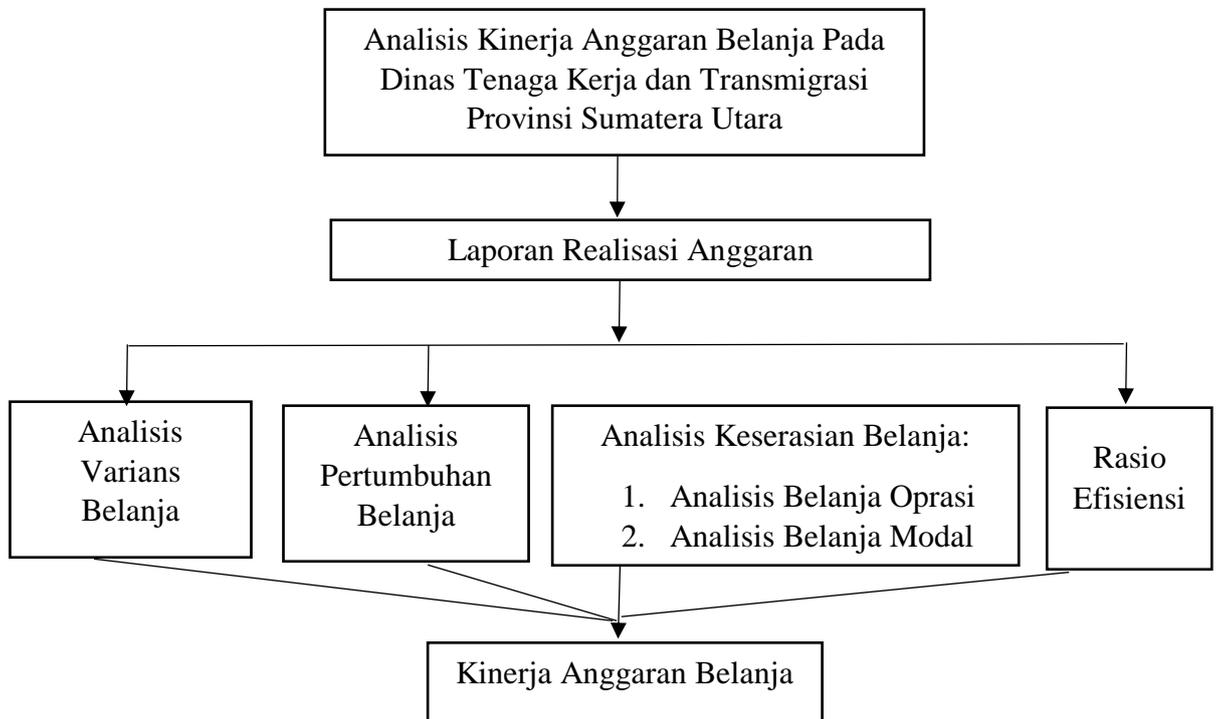
		Indonesia, Vol. 1 No. 1		fluktuatif, hal ini disebabkan oleh faktor inflasi dan adanya program yang tidak terselenggarakan pada tahun 2016. Hasil analisis keserasian belanja menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan DIY sudah melakukan harmonisasi belanja. Dari hasil analisis efisiensi belanja Dinas Kebudayaan DIY sudah melakukan efisiensi dengan baik.
6.	Nur Hasanah dan Elok Dwi Vidiyastutik (2018)	Analisis Kinerja Realisasi Anggaran dalam Belanja Daerah Pemerintah Probolinggo, Jurnal ECOBUSS Vol. 6 No. 2	Metode Deskriptif	Hasil analisis varians belanja pada tahun anggaran 2013-2017 menunjukkan jumlah selisih anggaran dan realisasi dilihat dari jumlah realisasi menunjukkan nominal yang cukup besar, maka dapat dikatakan kinerjanya kurang baik. Hasil analisis pertumbuhan belanja menunjukkan pertumbuhan belanja

				<p>selama tahun anggaran positif, meskipun pada tahun 2015 menunjukkan adanya penurunan pertumbuhan belanja sebesar -5.98%. hasil analisis keserasian belanja menunjukkan pemerintah kota Probolinggo lebih banyak menggunakan danannya untuk belanja operasi dibandingkan belanja modal. Hasil analisis belanja tidak langsung menunjukkan pengalokasian dana selalu mengalami perubahan. Dan untuk hasil analisis dari rasio efisiensi menunjukkan pemerintah kota Probolinggo sudah melakukan penghematan dari total anggaran yang telah dianggarkan.</p>
7.	Warti Ratnasari dan Siti Munawaroh (2019)	Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran	Metode Deskriptif	<p>Hasil analisis varians belanja dan realisasinya yang bersaldo negatif menunjukkan adanya penghematan belanja. Hasil analisis pertumbuhan belanja</p>

		(LRA) Pada Dinas Sosial Kabupaten Berau, Jurnal JEMMA, Vol. 2 No. 1		bersaldo negatif. Hasil analisis keserasian belanja menunjukkan adanya kecenderungan terhadap belanja operasi dibandingkan belanja modal. Dan untuk hasil analisis efisiensi belanja Dinas Sosial Kabupaten Berau telah melakukan efisiensi belanja dengan baik.
8.	Sri Hartinah (2018)	Analisis Anggaran Belanja Modal Sebagai Alat pendendalian Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara	Metode Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan realisasi anggaran belanja modal pada kantor Dewan perwakilan Rakyat Sumatera Utara belum habis direalisasikan dan kurang efektif. Realisasi anggaran belanja modal belum mencapai target. Dan fungsi anggaran sebagai alat pengendalian belanja modal belum dijalankan dengan baik.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kerangka pemikiran dalam penelitian Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Anggaran merupakan perencanaan manajerial yang dituangkan dalam istilah-istilah keuangan. Anggaran dalam organisasi pemerintahan memegang peran yang begitu penting. Anggaran menggambarkan kinerja yang akan dilakukan oleh pemerintah dimasa yang akan mendatang. Kinerja pemerintah dapat dilihat dari penggunaan anggaran yang dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang akan di analisis yakni Laporan Realisasi Anggaran. Pada Laporan Realisasi Anggaran ini kita bisa melihat anggaran dan realisasi anggaran. Dan dari laporan Realisasi Anggaran ini kita juga bisa mengukur kinerja anggaran belanja pemerintah dengan menggunakan beberapa analisis, yakni analisis varians belanja untuk melihat seberapa besar realisasi anggaran. Apakah melebihi dari anggaran belanja atau tidak. Analisis

pertumbuhan belanja untuk melihat pertumbuhan belanja positif atau negatif, analisis keserasian belanja untuk melihat keseimbangan antar belanja yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan rasio belanja operasi dan belanja modal dan analisis efisiensi untuk melihat seberapa besar pemerintah melakukan pemnghematan dalam menggunakan anggaran. Dari analisis ini, maka kita akan melihat kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Probinsi Sumatera Utara dan kita dapat menarik kesimpulan mengenai kinerja pemerintah pada Dinas Tenaga Terja dan Transmigrasi provinsi Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, dan mencoba untuk menggambarkan fenomena secara detail.¹ Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke obyek penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di jalan Asrama No. 143 Medan . waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2021 sampai dengan Juli 2021.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian										
		Des 2020	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Mei 2021	Jun 2021	Juli 2021	Ags 2021	Sept 2021	Okt 2021
1.	Pengajuan Judul											
2.	Pra Riset											
3.	Pembuatan Proposal											
4.	Bimbingan Proposal											
5.	Seminar Proposal											

¹Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 62.

6.	Riset										
7.	Penyusunan Skripsi										
8.	Bimbingan Skripsi										
9.	Sidang Skripsi										

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.² Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut atau bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.³ Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019.

D. Jenis Data Penelitian

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama, guna mencari informasi sebagai data pendukung yang

²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 80

³NurAhmadi Bi Rahmani, *Motodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: Febi UINSU Press, 2016), h. 34.

dibutuhkan dalam penelitian. Data ini berupa wawancara dengan pegawai Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.

2. Data Sekunder

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari subyek penelitian. Data sekunder sudah dikumpulkan dan disajikan oleh pihak lain. Data sekunder biasanya berupa data statistik hasil penelitian dari buku laporan survei, majalah atau surat kabar, dokumentasi maupun arsip-arsip resmi. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data Laporan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2019 dan data mengenai sejarah ringkas, struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2019.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh data berupa gambaran umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara dan untuk memperoleh informasi lain berkaitan dengan data yang diperlukan di dalam penelitian ini.
2. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dari dokumen-dokumen terkait yang ada di instansi yang diperlukan di dalam penelitian ini, yaitu laporan realisasi anggaran tahun 2015-2019 dan data struktur organisasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Sumatera Utara.

F. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variable adalah pengertian dari variable-variabel yang ditetapkan dalam sebuah penelitian .Variabel adalah obyek penelitian, atau apa

yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian.⁴ Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang akan dilakukan dan dinyatakan dalam satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu.
2. Kinerja keuangan merupakan gambaran dari hasil kegiatan yang atau program yang dilaksanakan sehubungan dengan penggunaan anggaran
3. Analisis varians belanja merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui selisih antara anggaran dan realisasi anggaran.
4. Analisis pertumbuhan belanja merupakan analisis untuk mengetahui pertumbuhan belanja setiap tahunnya apakah mengalami kenaikan (positif) atau mengalami penurunan (negatif)
5. Analisis keserasian belanja merupakan analisis untuk mengetahui keseimbangan antar belanja operasi dan belanja modal.
6. Rasio efisiensi merupakan rasio untuk mengukur tingkat penghematan dalam penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu teknis analisis data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan dan kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori sehingga memberikan informasi dan gambaran yang jelas kemudian diambil kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 161.

1. Mengumpulkan data berupa laporan realisasi anggaran tahun 2015-2019 dan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara.
2. Menghitung data yang didapatkan dengan menggunakan analisis varians belanja, pertumbuhan belanja, keserasian belanja dan rasio efisiensi.
3. Menganalisis data yang telah dihitung untuk memberikan gambaran mengenai suatu masalah yang terjadi.
4. Menarik kesimpulan.

Untuk menganalisis kinerja anggaran belanja daerah, dapat dihitung dengan menggunakan analisis :

1. Analisis Varians Belanja

Analisis Varians Belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi dengan anggaran. Hasil analisis dapat dikatakan baik jika realisasi belanja tidak melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan dan sebaliknya.

Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif.

Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Pertumbuhan Belanja Thn}_t \\ & = \frac{\text{realisasi belanja tahun } t - \text{realisasi belanja tahun } t-1}{\text{realisasi belanja tahun } t-1} \times 100\% \end{aligned}$$

Tabel 3.2
Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja

Kriteria Pertumbuhan Belanja	Ukuran
Naik	Positif
Turun	Negatif

3. Analisis keserasian Belanja

Analisis Keserasian Belanja Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. analisis ini anatar lain sebagai berikut:

a. Analisis Belanja Operasi

Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

b. Analisis Belanja Modal

Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

4. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi belanja merupakan rasio untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Rumus Rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3.3
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% keatas	Tidak Efisien
90-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Keputusan Mendagri No.690.900.327 tahun1996

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Singkat Instansi

Sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945 pasal 27 Ayat 2 bahwa pembangunan ketenagakerjaan ditunjuk untuk menyediakan lapangan kerja bagi setiap angkatan kerja sehingga dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara terletak di Jln. Asrama No. 143 Medan yang berdiri sejak tanggal 13 Juli 2001 dan sebelum menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara telah beberapa kali mengalami perubahan nama antara lain :

- a. Departemen Transmigrasi dan Sosial.
- b. Departemen Tenaga Kerja dan Koperasi.
- c. Departemen Tenaga Kerja.
- d. Departemen Transmigrasi.
- e. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Namun setelah ada Undang – undang No. 22 Tahun 1999 serta di tetapkan PERDA (Peraturan Daerah) No. 3 Tahun 2001 tentang Dinas Provinsi Sumatera Utara, maka kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja di ubah menjadi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan gabungan dan pengintegrasian dari :

- a. Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja yang beralamat di Jln. Asrama No. 143 Medan, yang dipimpin oleh Bapak Drs. Moch Chodjin.
- b. Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara yang beralamatkan di Jln. SM. Raja Medan yang dipimpin oleh Bapak Ir. Iwan Rifai, MM.

- c. Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH yang beralamat di Jln. William Iskandar No. 331 Medan yang dipimpin Ir. Aziz Zeid Gumai.

Tujuan dari 3 (tiga) Kantor Dinas Provinsi Sumatera Utara adalah untuk Efisien waktu, Tenaga dan dana yang diinvestasikan untuk ketiga kantor ini. Selain dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 dan PERDA No. 3 Tahun 2001 perubahan ini juga disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- a. Perubahan atau penggantian Kabinet.
- b. Dilikuidasinya beberapa Departemen sehingga banyak Departemen yang digabungkan.
- c. Otonomi Daerah.

2. Visi dan Misi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara mempunyai visi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Sejahtera”

Maka yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

- a. Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten dan produktif.
- b. Terwujudnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- c. Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.
- d. Terwujudnya perlindungan tenaga kerja.
- e. Terwujudnya kesejahteraan pekerja dan purna kerja.
- f. Terwujudnya penataan persebaran penduduk dengan “ 3S “ yaitu serasi, seimbang dan sejahtera.

Sedangkan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja dan perluasa tenaga kerja.

- b. Meningkatkan dan mengembangkan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta kesejahteraan tenaga dan purna kerja.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan perlindungan tenaga kerjaan.
- d. Meningkatkan dan mengembangkan penataan persebaran penduduk yang serasi, seimbang dan sejahtera.

3. Ruang Lingkup Bidang Kegiatan

Rencana startegis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara menetapkan rencana program rutin dan program tupoksi Dinas tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Rencana program dan kegiatan yang dirancang mengacu pada peraturan gubernur Nomor 65 Tahun 2017 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Tenaga kerja Provinsi Sumatera Utara. Adapun program rutin dan program tupoksi adalah sebagai berikut:

- a. Program Rutin:
 - 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
 - 4) Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur.
 - 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan.
- b. Program Tupoksi:
 - 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Teaga Kerja.

4. Logo dan Struktur Organisasi

a. Logo dan Makna

Setiap perusahaan mempunyai logo sebagai ciri khusus yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Pada umumnya logo yang menjadi lambing perusahaan mempunyai makna. Bentuk dari logo itu sendiri tergantung dari kebijakan perusahaan dan sesuai dengan apa yang menjadi tugas perusahaan tersebut.

Bentuk dari Logo Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1

Logo Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara

Adapun bentuk logo Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara terdiri atas lima bagian dengan makna sebagai berikut :

- 1) Kepala tangan yang di acungkan ke atas dengan menggenggam rantai beserta perisainya :melambangkan kebulatan tekad perjuangan rakyat Provinsi Sumatera Utara melawan imperialism / kolonialisme, feodalisme dan komunisme.
- 2) Bintang bersudut lima Perisai dan Rantai : melambangkan kesatuan masyarakat di dalam membela dan mempertahankan Pancasila
- 3) Pabrik, pelabuhan, pohon karet, pohon sawit, daun tembakau, ikan, daun padi dan Tulisan “ SUMATERA UTARA ” : melambangkan daerah yang indah permai masyur dengan kekayaan alamnya yang melimpah – limpah.
- 4) Tujuh belas kuntum bunga kapas, delapan sudut sarang laba –laba dan empat puluh lima butir padi : menggambarkan tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan dimana ketiga – tiganya ini berikut tongkat di bawah kepalan tangan melambangkan watak kebudayaan yang

mencerminkan kebesaran bangsa, Patriotisme, pencinta keadaan dan pembela keadilan.

- 5) Bukit barisan yang berpuncak lima : melambangkan tata kemasyarakatan yang kepribadian yang luhur, bersemangat persatuan kegotongroyongan yang dinamis.

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan suatu perwujudan yang menunjukkan hubungan antar fungsi serta wewenang dan tanggung jawab, yang berhubungan satu sama lain dari masing – masing orang yang jabatan dari organisasi atau instansi. Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Sub Bagian Umum
5. Kepala Sub Bagian Keuangan
6. Kepala Sub Bagian Program
7. Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
 - 1) Seksi Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja
 - 2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja
 - 3) Seksi Standarisasi Kompetensi Pemagangan
8. Kepala Bidang Hubungan Industrial
 - 1) Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Organisasi Pekerjaan dan Pengusaha
 - 3) Seksi Penyelesaian Perselisihan
9. Kepala Bidang Perlindungan dan Ketenagakerjaan
 - 1) Seksi Ketenagakerjaan
 - 2) Seksi Keselamatan dan Kesehatan kerja
 - 3) Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Khusus

10. Kepala Bidang Transmigrasi
 - 1) Seksi Fasilitasi Penyiapan Lahan
 - 2) Seksi Pembaguan Permukiman
 - 3) Seksi penempatan dan Investasi
11. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

5. Pebagian Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun bidang – bidang kerja berdasarkan struktur organisasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, memberikan bimbingan dan pembinaan, pengelolaan administrasi, pengelolaan ketatausahaan serta pembinaan an pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Kepala Dinas mempunyai Fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 2) Perumusan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 3) Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan pelayanan umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 4) Pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 5) Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- 6) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan dinas.
- 7) Pemberian rekomendasi perijinan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

- 8) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional.
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas, penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, kepegawaian, pengelola keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protocol, perjalanan dinas, kearsipan dan ketatalaksanaan dinas serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja dibidang kesekretariatan dinas.
- 2) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- 3) Penyiapan badan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat menyurat.
- 4) Pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan.
- 5) Pengelolaan keuangan, perjalanan Dinas dan pertanggung jawaban keuangan.
- 6) Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Kelomok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisnya masing – masing dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang jabatan fungsional.

d. Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, urusan rumah tangga, perlengkapan kehumasan, protocol, melaksanakan penyiapan barang kebutuhan pegawai, pengembangan kepegawaian, mutasi pegawai serta Tata Usaha kepegawaian.

Kepala Sub bagian Umum mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum.
- 2) Mengelola kegiatan surat menyurat dan menyusun rencana penempatan mutasi dan pelatihan pegawai di lingkungan dinas.
- 3) Mengurus Tata Usaha pekerjaan Dinas dan menganalisa pengembangan pekerjaan di lingkungan dinas.
- 4) Melakukan penginventarisasian, pembelian, pendistribuan barang – barang inventaris kantor dan menyiapkan pedoman kerja pegawai di lingkungan dinas.
- 5) Mengelola barang – barang inventaris kekayaan milik Negara/daerah di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 6) Melaksanakan pemeliharaan keamanan, ketertiban, kebersihan dan pemeliharaan gedung kantor.
- 7) Menggandakan dan mengirimkan hasil program kerja dan laporan masing – masing Sub Dinas dan memberikan usul pembinaan dan pengembangan pegawai.

- 8) Membantu kegiatan tata usaha dari asing – masing Dinas dan memberikan usul pembinaan dan pengembangan pegawai.
- 9) Mengurus pelayanan dan pemeliharaan kegiatan Sub Bagian Umum.
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum.
- 11) Melaksanakan urusan kehumasan dan protocol serta memantau perkembangan pengurusan pegawai.

e. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran verifikasi serta pengurus perbendaharaan.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan.
- 2) Menyusun rencana anggaran Dinas.
- 3) Mengelola administrasi keuangan dinas.
- 4) Membuat laporan penggunaan keuangan dinas.
- 5) Mengevaluasi anggaran dan penggunaan keuangan dinas.
- 6) Memberikan usulan untuk perbaikan anggaran dan pengelolaan keuangan dinas.
- 7) Mengkoordinasi pengurusan gaji dan bendaharawan gaji.
- 8) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan.
- 9) Membantu kegiatan Sub Dinas dalam bidang administrasi keuangan.

f. Kepala Sub Bagian Program

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja setiap Sub Bagian, mengawasi pelaksanaan program kerja serta melaporkan hasil program kerja kepada Kepala Dinas. Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun rencana kerja Sub Bagian Program.

- 2) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan.
- 3) Memantau dan mengedalikan kegiatan bawahan serta mengevaluasi hasil kerja.
- 4) Membuat laporan pelaksanaan program rencana kerja kepada Kepala Dinas.

g. Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja

Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan penunjuk teknis melaksanakan pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, pembinaan tenaga kerja mandiri, penyaluran dan penempatan tenaga kerja serta perluasan lapangan dan kesempatan kerja.

Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan program kerja di Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.
- 2) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.
- 3) Perumusan, perencanaan dan pelaksanaan pembinaan kelembagaan, instruktur, tenaga pelatih dan system pelatihan tenaga kerja.
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan pembinaan standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja.
- 5) Pengembangan program pelatihan untuk penempatan jasa tenaga kerja, penggantian tenaga kerja asing, serta untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
- 6) Pelaksanaan pembinaan pencari kerja melalui informasi pasar kerja/bursa kerja baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta.

- 7) Pembinaan dan penempatan tenaga kerja pemuda dari wanita serta penyandang cacat dan usia lanjut.
- 8) Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan antar kerja antar daerah antar kerja local dan antar kerja antar Negara.
- 9) Pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja dan usaha mandiri.
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

h. Kepala Bidang Hubungan Industrial

Kepala Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha, lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartite, pembinaan hubungan industrial, pengawasan norma ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, penyidik terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan, pelaksanaan syarat – syarat kerja, pelaksanaan pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja serta penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kepala Bidang Hubungan Industrial mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan program kerja di bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial.
- 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial.
- 3) Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja, pengawasan norma kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, serta jaminan sosial tenaga kerja.
- 4) Pelaksanaan pembinaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha.

- 5) Pelaksanaan pembinaan lembaga kerjasama Bipartit dan melaksanakan kegiatan lembaga Tripartit.
- 6) Pelaksanaan pembinaan persyaratan kerja.
- 7) Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial.
- 8) Pelaksanaan pembinaan pengupahan, pelaksanaan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan kesejahteraan pekerja.
- 9) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta penyidikan terhadap pelanggaran norma kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja dan penggunaan tenaga kerja asing.
- 10) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakkan hukum di bidang ketenagakerjaan.
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

i. Kepala Bidang Perlindungan dan Ketenagakerjaan

Kepala Bidang Perlindungan dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas memimpin, merencanakan dan mengendalikan kegiatan perlindungan dan ketenagakerjaan.

Bidang Perlindungan dan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja Perlindungan dan Ketenagakerjaan.
- 2) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan.
- 3) Memantau, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan serta mengevaluasi hasilnya.
- 4) Memeriksa dan mengawasi terhadap perjanjian kerja dan persetujuan bersama agar tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan yang berlaku.
- 5) Melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap pegawai dan pengusaha pada Badan – badan Usaha Negara dan Swasta tentang aturan ketenagakerjaan.

- 6) Memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan ketengakerjaan agar berjalan sesuai aturan yang berlaku.
- 7) Membuat konsep dan bahan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.
- 8) Melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang menggunakan tenaga kerja usia sekolah dan pekerja wanita yang dipekerjakan pada tempat – tempat yang berbahaya.
- 9) Melakukan tindakan korektif terhadap perusahaan baik secara preventif maupun represif demi keselamatan kerja.
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

j. Kepala Bidang Transmigrasi

Kepala Bidang Transmigrasi mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan petunjuk teknis di bidang transmigrasi, menyusun rencana, program kerja, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang transmigrasi, melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan transmigran serta penempatan transmigran ke daerah tujuan transmigrasi.

Kepala Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja di bidang transmigrasi.
- 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang transmigrasi.
- 3) Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan perencanaan bidang transmigrasi.
- 4) Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan bidang transmigrasi.
- 5) Pelaksanaan koordinasi, informasi dan edukasi kerjasama antar daerah.
- 6) Pengawasan dan pengendalian teknis bidang transmigrasi.
- 7) Pelaporan pelaksanaan kegiatan.

k. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas memimpin, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan ketalikan petugas lapangan serta melaporkan hasil kerjanya.
- 2) Memantau dan melaporkan perkembangan tugas di lapangan.
- 3) Mempelajari dan menyelesaikan masalah yang timbul di lapangan.
- 4) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

B. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Sumatera Utara. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit secara tersanding antara anggaran dan realisasinya. Informasi ini sangat penting untuk menilai kinerja pemerintah.

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Sumatera Utara Tahun
2015-2019

Uraian	Tahun 2015		Tahun 2016	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Anggaran Belanja	32.906.624.850	30.879.816.399	38.340.159.000	31.983.868.678
Belanja Operasi	32.742.600.650	30.732.816.399	37.998.475.000	31.646.591.178
Belanja Modal	164.024.200	147.000.000	341.684.000	337.277.500

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Anggaran Belanja	51.205.294.000	46.765.731.082	53.163.458.948	50.074.261.993
Belanja Operasi	50.571.031.700	46.294.123.782	52.959.280.198	49.870.303.743
Belanja Modal	634.262.300	471.607.300	204.178.750	203.958.250

Uraian	Tahun 2019	
	Anggaran	Realisasi
Anggaran Belanja	54.462.365.423	49.453.131.346
Belanja Operasi	53.626.822.648	48.618.898.666
Belanja Modal	835.542.775	834.232.680

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Namun realisasi tidak selalu mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah anggaran terdapat pada tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp 54.462.365.423.

Anggaran belanja operasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara selama lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah anggaran belanja operasi terdapat pada tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp 53.626.822.648.

Anggaran belanja modal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara selama lima tahun terakhir tidak selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2015-2017, anggaran mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 anggaran belanja modal mengalami penurunan, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019. Peningkatan anggaran dan realisasi anggaran terdapat pada tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp 835.542.775 dan realisasi sebesar Rp 834.232.680. Dan penurunan anggaran belanja modal

terdapat pada tahun 2018 anggaran sebesar Rp 204.178.750 dengan realisasi sebesar Rp 203.958.250.

C. Hasil Penelitian

1. Analisis Varians Belanja

Analisis Varians Belanja Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi dengan anggaran.¹

Untuk mengetahui berapa besaran antara realisasi dengan anggaran dapat menggunakan rumus:

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Tabel 4.2
Analisis Varians Belanja
Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	Perbandingan (%)
2015	32.906.624.850	30.879.816.399	(2.026.808.451)	94%
2016	38.340.159.000	31.983.868.678	(6.356.290.322)	83%
2017	51.205.294.000	46.765.731.082	(4.439.562.918)	91%
2018	53.163.458.948	50.074.261.993	(3.089.196.955)	94%
2019	54.462.365.423	49.453.131.346	(5.009.234.007)	91%

Data Hasil Olahan

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 anggaran sebesar Rp 32.906.624.850 dan realisasi sebesar Rp 30.879.816.399 atau 94%, dengan selisih sebesar Rp 2.026.808.451 atau 6%. Hal ini menunjukkan anggaran pada tahun ini belum terserap sepenuhnya dan menyisakan 6% dari total anggaran.

¹Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: UPP STM YKPN, ed. 2, 2010), h. 157.

Pada tahun 2016 anggaran sebesar Rp 38.340.159.000 dan realisasi sebesar Rp 31.983.868.678 atau 83%, dengan selisih sebesar Rp 6.356.290.322 atau 17%, hal ini menunjukkan adanya penurunan jumlah penggunaan anggaran dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2017 anggaran sebesar Rp 51.205.294.000 dan ralisasi sebesar Rp 46.765.731.082 atau 91%, dengan selisih sebesar Rp 4.439.562.918 atau 9%, dari total anggaran yang ada. jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penggunaan anggaran pada tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018 anggaran sebesar Rp 53.163.458.948 dan realisasi sebesar Rp 50.074.261.993 atau 94%, dengan selisih sebesar Rp 3.089.196.955 atau 6% dan realisasi anggaran tahun ini mengalami peningkatan sebesar 3% dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019 anggaran sebesar Rp 54.462.365.423 dan realisasi sebesar Rp 49.453.131.346 atau 91%, dengan selisih sebesar Rp 5.009.234.007 atau 9% dari jumlah anggaran. Jika diandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, pada tahun 2019 anggaran mengalami kenaikan, namun realisasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan anggaran pada tahun ini belum terserap sepenuhnya dan menyisakan 9% dari total anggaran yang ada.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ketahun mengalami Peningkatan (positif) atau mengalami penurunan (negatif).²

Pertumbuhan belanja dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thn}_t = \frac{\text{realisasi belanja tahun } t - \text{realisasi belanja tahun } t-1}{\text{realisasi belanja tahun } t-1} \times 100\%$$

²*Ibid.*, h. 160.

Tabel 4.3
Analisis Pertumbuhan Belanja
Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Realisasi	Kenaikan (Penurunan)	%
2014	32.581.309.823		
2015	30.879.816.399	(1.701.493.424)	(5.22)
2016	31.983.868.678	1.104.052.279	3.58
2017	46.765.731.082	14.781.862.404	46.22
2018	50.074.261.993	3.308.530.911	7.07
2019	49.453.131.346	(621.130.647)	(1.24)

Data Hasil Olahan

Pada tabel diatas dapat dilihat pertumbuhan belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015 bernilai negatif dengan persentase sebesar -5.22%, hal ini dikarenakan belanja mengalami penurunan sebesar Rp 1.701.493.424 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 pertumbuhan belanja bernilai positif dengan persentase sebesar 3.58%, hal ini disebabkan adanya peningkatan jumlah realisasi belanja sebesar Rp 1.104.052.279 dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2017 pertumbuhan belanja bernilai positif dan sangat meningkat dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 46.22%, hal ini disebabkan meningkatnya jumlah realisasi belanja sebesar Rp 14.781.862.404 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 pertumbuhan belanja juga bernilai positif, walaupun secara persentase tidak sebesar tahun sebelumnya. Pertumbuhan belanja mengalami peningkatan sebesar Rp 3.308.530.911 atau sebesar 7.07%. Pada tahun 2019 pertumbuhan belanja bernilai negatif, hal ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah realisasi belanja sebesar Rp 621.130.647 atau sebesar -1.24%.

3. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja.³

a. Belanja Operasional

Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin dan berulang (recurrent).

Rumus rasio belanja operasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 4.4

**Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja
Tahun Anggaran 2015-2019**

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja	Persentase(%)
2015	30.732.816.399	30.879.816.399	99.52
2016	31.646.591.178	31.983.868.678	98.95
2017	46.294.123.782	46.765.731.082	98.99
2018	49.870.303.743	50.074.261.993	99.59
2019	48.618.898.666	49.453.131.346	98.31

Data Hasil Olahan

³*Ibid.*, h. 162.

Pada tabel tersebut dapat dilihat pada tahun 2015 penggunaan anggaran belanja untuk belanja operasi sebesar Rp 30.879.816.399 atau sebesar 99.52% dari total anggaran yang ada. Pada tahun 2016, penggunaan anggaran untuk belanja operasi sebesar Rp 31.646.591.178 atau sebesar 98.95%, meskipun secara persentase mengalami penurunan, jumlah penggunaan anggaran untuk belanja operasi pada tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, total belanja operasi mengalami peningkatan menjadi Rp 46.294.123.782 atau sebesar 98.99% belanja operasi pada tahun ini meningkat sebesar 0.4% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 penggunaan anggaran untuk beanja operasi sebesar Rp 49.870.303.743 atau sebesar 99.59%, walaupun secara persentase mengalami penurunan, namun jumlah penggunaan anggaran untuk belanja operasi pada tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2019 penggunaan anggaran untuk belanja operasi sebesar Rp 48.618.898.666 atau sebesar 98.31%, penurunan jumlah anggaran belanja pada tahun ini disebabkan menurunnya jumlah anggaran dari tahun sebelumnya, sehingga alokasi untuk belanja operasi juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

b. Belanja Modal

Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total ralisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan.⁴

Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

⁴*Ibid.*, h. 164.

Tabel 4.5
Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja
Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja	Persentase
2015	147.000.000	30.879.816.399	0.48%
2016	337.277.500	31.983.868.678	1.05%
2017	471.607.300	46.765.731.082	1.01%
2018	203.958.250	50.074.261.993	0.41%
2019	834.232.680	49.453.131.346	1.69%

Data Hasil Olahan

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 total penggunaan anggaran untuk belanja modal sebesar Rp 147.000.000 atau sekitar 0.48% dari anggaran yang ada. Pada tahun 2016 penggunaan anggaran untuk belanja modal sebesar Rp 337.277.500 atau sebesar 1.05%, jika dilihat dari tahun sebelumnya, jumlah belanja modal pada tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 penggunaan anggaran untuk belanja modal sebesar Rp 471.607.300 atau sekitar 1.01%, jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, penggunaan anggaran untuk belanja modal sebesar Rp 203.958.250 atau sekitar 0.41%. Jika dilihat dari tahun sebelumnya, penggunaan anggaran untuk belanja modal pada tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dan alokasi untuk belanja modal sangat minim yakni hanya 0.41%. Pada tahun 2019, penggunaan anggaran untuk belanja modal sebesar Rp 834.232.680 atau sebesar 1.69%, jika dilihat dari tahun sebelumnya, jumlah penggunaan anggaran belanja modal pada tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

4. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.⁵

Rumus Rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 4.6

Rasio Efisiensi

Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Realisasi	Anggaran	Persentase
2015	30.879.816.399	32.906.624.850	93.84%
2016	31.983.868.678	38.340.159.000	83.42%
2017	46.765.731.082	51.205.294.000	91.33%
2018	50.074.261.993	53.163.458.948	94.19%
2019	49.453.131.346	54.462.365.423	90.80%

Data hasil Olahan

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 93,84% dengan total realisasi anggaran sebesar Rp 30.879.816.399. Penggunaan anggaran pada tahun ini dapat dikategorikan pemerintah masih kurang efisien dalam melakukan penghematan anggaran.

Pada tahun 2016 tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 83.42% dengan total realisasi anggaran sebesar Rp 31.983.868.678 dan dapat dikategorikan pemerintah cukup efisien dalam melakukan penghematan anggaran. Dan dapat dikatakan tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2017 tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 91.33% dengan total realisasi anggaran sebesar Rp 46.765.731.082 dan dapat

⁵Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2009), h. 132.

dikategorikan pemerintah masih kurang efisien dalam melakukan penghematan anggaran.

Pada tahun 2018 efisiensi penggunaan anggaran sebesar 94.19% dengan total realisasi anggaran sebesar Rp 50.074.261.993 dan dapat dikategorikan pemerintah cukup efisien dalam melakukan penghematan anggaran.

Dan pada tahun 2019 tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 90.80% dengan total realisasi anggaran sebesar Rp 49.453.131.346 dan dapat dikategorikan pemerintah cukup efisien dalam melakukan penghematan anggaran.

D. Pembahasan

1. Analisis Varians Belanja

Hasil dari analisis varians belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015 menunjukkan penggunaan anggaran sebesar Rp 30.879.816.399 atau sebesar 94% dari anggaran, pada tahun 2016 penggunaan anggaran sebesar Rp 31.983.868.678 atau sebesar 83% dari anggaran, pada tahun 2017 penggunaan anggaran sebesar Rp 46.765.731.082 dari anggaran, pada tahun 2018 penggunaan anggaran sebesar Rp 50.074.261.993 atau sebesar 94% dari anggaran. Dan pada tahun 2019 penggunaan anggaran sebesar Rp 49.453.131.346 dari anggaran. Jika dilihat dari persentase penggunaan anggaran, kinerja anggaran belanja dilihat dari varians belanja dapat dikatakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara telah memanfaatkan anggaran dengan cukup baik, dikarenakan adanya penghematan anggaran dan tidak ada belanja yang melebihi dari anggaran yang ada. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan pada salah satu staf di bagian keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara. Serapan anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2015 dan 2018 yaitu 94% dan serapan anggaran terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 83%.

Secara umum, kinerja pemerintah dapat dikatakan kurang baik apabila realisasi belanja lebih besar dari anggaran belanja. Oleh sebab itu

pemerintah harus memanfaatkan sebaik mungkin anggaran yang ada dan melakukan penghematan dalam belanja.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Pertumbuhan belanja umumnya mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Hasil analisis pertumbuhan belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2015-2019 menunjukkan pertumbuhan belanja mengalami fluktuasi, artinya pertumbuhan belanja tidak selalu mengalami kenaikan, namun juga mengalami penurunan. Penurunan pertumbuhan belanja terjadi pada tahun 2015 dan 2019, yaitu -5.22% dan -1.24%. Pada tahun 2016-2018 pertumbuhan anggaran mengalami kenaikan yaitu sebesar 3.58%, 46.22%, dan 7.07%. Meskipun pada tahun 2015 dan 2019 pertumbuhan belanja mengalami penurunan, secara umum pertumbuhan belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015-2019 dapat dikatakan baik dengan rata-rata sebesar 10.08%

3. Analisis Keserasian Belanja

Berdasarkan hasil analisis keserasian belanja pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2015-2019 menunjukkan belanja operasi pada tahun 2015 sebesar 99.52% dan belanja modal sebesar 0.48%. Pada tahun 2016 belanja operasi sebesar 98.95% dan belanja modal sebesar 1.05%. pada tahun 2017 belanja operasi sebesar 98.99% dan belanja modal sebesar 1.01%. Pada tahun 2018 belanja operasi sebesar 99.59% dan belanja modal sebesar 0.41%. Selanjutnya pada tahun 2019 belanja operasi sebesar 98.31% dan belanja modal sebesar 1.69%. Dari hasil analisis tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran pada belanja operasi cenderung lebih besar dibandingkan pada belanja modal. Sehingga, penggunaan anggaran untuk belanja modal relatif lebih sedikit, dan pada tahun 2015 dan 2018 realisasi belanja modal tidak mencapai 1%. Jika dilihat

dari tahun 2015-2019 belanja operasi selalu diatas 90% dan hal ini melebihi dari proporsi belanja yang ditetapkan, yakni 60-90%. Dan belanja modal tidak mencapai proporsi yang ditetapkan yakni 5-20%. Hal ini menunjukkan penggunaan anggaran lebih banyak dialokasikan untuk belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran. Sedangkan untuk investasi yang manfaatnya jangka menengah dan panjang masih sedikit.

4. Analisis Efisiensi Belanja

Dari hasil analisis efisiensi belanja menunjukkan bahwa pada tahun 2015 tingkat efisiensi sebesar 93.84% dan berada pada posisi kurang efisien, yang artinya pemerintah masih kurang efisien dalam mengelola anggaran. Pada tahun 2016, tingkat efisiensi sebesar 83.42% dan berada pada posisi efisien, yang artinya pemerintah mampu mengelola anggaran dengan baik dan melakukan penghematan terhadap anggaran. Pada tahun 2017 dan 2018 tingkat efisiensi sebesar 91.33% dan 94.19% dan berada pada posisi kurang efisien. Artinya pemerintah masih kurang efisien dalam mengelola anggaran. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah penggunaan anggaran dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 tingkat efisiensi sebesar 90.80% dan berada pada posisi efisien. Hal ini dikarenakan jumlah realisasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Artinya pemerintah mampu mengelola anggaran dengan baik dan melakukan efisiensi anggaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai kinerja anggaran belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja anggaran belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara dilihat dari varians belanja pada tahun 2015-2019 secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat pada tahun tersebut tidak ada realisasi belanja yang melebihi dari anggaran belanja.
2. Kinerja anggaran belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara dilihat dari pertumbuhan belanja pada tahun 2015-2019, pertumbuhan belanja tidak selalu bernilai positif, namun juga bernilai negatif. Pertumbuhan belanja pada tahun 2015 sebesar -5.22%, pada tahun 2016 sebesar 3.58%, pada tahun 2017 sebesar 46.22%, pada tahun 2018 sebesar 7.07% dan pada tahun 2019 sebesar -1.24%. Pertumbuhan belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan rata-rata 10.08%
3. Kinerja anggaran belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara dilihat dari keserasian belanja, realisasi anggaran belanja operasi cenderung lebih besar daripada belanja modal. Rata-rata belanja operasi sebesar 99.07%. Sedangkan rata-rata belanja modal sebesar 0.93%. Hal ini dapat dikatakan kurang baik, karena pemerintah harusnya dapat menyeimbangkan antara kedua belanja tersebut.
4. Kinerja anggaran belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara dilihat dari efisiensi pada tahun 2016 dan tahun 2019 dapat dikatakan cukup efisien, karena berada pada posisi 80-90%. Sedangkan untuk tahun 2015, 2017-2018 kinerja anggaran belanja dapat dikatakan masih kurang efisien, karena rasionya berada pada 90-100%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara
 - a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Sumatera Utara harus mempertahankan kinerja anggaran belanja yang sudah baik, karena tidak ada beanja yang melebihi dari yang sudah dianggarkan.
 - b. Dalam hal keserasian belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara sebaiknya juga meningkatkan penggunaan anggaran terhadap belanja modal. Karena belanja modal digunakan untuk aset-aset tetap yang berguna dalam jangka panjang dan memberikan manfaat dimasa yang akan datang.
 - c. Pertumbuhan belanja pada periode tersebut dapat dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran pada periode selanjutnya agar penyusunan anggaran pada periode selanjutnya menjadi lebih baik. Dan dalam penyusunan anggaran hendaklah pemerintah lebih memperhatikan berbagai aspek, agar anggaran yang telah disusun dapat direalisasikan dengan baik.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitia selanjutnya diharapkan dapat menambah periode penelitian dan menggunakan lebih banyak rasio dalam mengukur kinerja keuangan Dinas Tenaga Terja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera utara agar memperoleh hasil yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- _____. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- _____. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Arif, Bahtiar, dkk. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Daling, Marchelino. 2013. *Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal EMBA. Vol. 1 No. 3
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks
- Departemen Agama RI. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Al-Hambra
- Erlina dan Rusdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Medan: Brama Ardian
- Erlina, dkk. 2016. *Akuntansi Keuangan daerah berbasis Akrua, Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013*. Jakarta: Salemba Empat
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana
- Ikhsan, Arfan. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Medan: Madenatera
- Kadir Arno, Abdul. 2016. *Penyusunan Anggaran Perspektif Fiqhi Anggaran Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Al-Amwal, Vol. 1 No. 1
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STM YKPN, ed. 2

- Mahsun, Mohammad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- _____. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- _____. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Nordiawan, Deddi. 2012. *Akunansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2006. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Oktavia Ropa, Mega. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA. Vol. 4 No. 2
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. 2016. Medan: Febi UINSU Press
- Rahma, Tri Indah Fadhila. 2018. *Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Bagi Hasil Bank Syariah Di Indonesia*. Jurnal j-EBIS, Vol 3 No. 1
- Sandy Mokodompit, Paramitha, dkk. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu*. Jurnal EMBA. Vol. 02 No. 02
- Sinambela, Elizar, dkk. 2016. *Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada pemerintahan provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Vol. 16 No. 1
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Ulum, Ihyaul MD. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Malang: UMM Press
- Wahyuni Lubis, Arnida. 2018. *Diktat Audit Kinerja Sektor Publik*. Medan
- Yunita Liando, Grace dan Ingriani Elim. 2016. *Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Jurnal EMBA. Vol.4 No. 1

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama : Nadra Suhaila Lubis
NIM : 0502173448
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 16 Juni 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Kapten M. Jamil Lubis Gg. Mangga No. 12

II. NAMA ORANG TUA

Ayah : Lukman Hakim Lubis
Ibu : Khadijah

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan berijazah tahun 2009
SMPN 12 Medan berijazah tahun 2012
SMKN 3 Medan berijazah tahun 2015

Lampran 1. Wawancara

1. Menurut bapak, dalam penyusunan anggaran, aspek apa saja yang perlu diperhatikan pak?
Jawab: untuk penyusunan anggaran, itu di bagian program, bukan di bagian keuangan. Namun kalau dari aspek keuangan, dalam penyusunan anggaran mesti melihat dari laporan terdahulu, di proyeksikan untuk ditahun kedepan berapa kenaikan yang diperkirakan, itu yang menjadi dasar dalam penyusunan keuangan, kalau di bagian keuangan.
2. Apakah dalam penyusunan anggaran ada sektor yang diprioritaskan pak?
Jawab: Tupoksinya lebih ke bagian program. Kalau dikantor ini, lebih ke bagian, karena Dinas Tenaga Kerja, pasti yang berkaitan dengan tenaga kerja, itu yang diprioritaskan. Contoh, untuk tahun 2021 ini kita itu prioritasnya kalau dari anggaran, saya lihat kearah pelatihan tenaga kerja.
3. Menurut bapak, bagaimana serapan anggaran dalam 5 tahun (2015-2019) terakhir ini pak?
Jawab: serapan anggaran di dinas tenaga kerja cukup baik, karena kita di atas rata-rata 90%
4. Apakah ada kendala dalam pencapaian target realisasi anggaran pak?
Jawab: Ada. Kendalanya, pasti ada satu kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Sehingga realisasinya nol. Nah itu karean penganggarannya salah, ada yang kurang komponennya jadi menyebabkan kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan dan yang kedua anggarannya ada, namun kegiatannya tidak bisa dilaksanakan dilapangan.
5. Apa penyebab menurunnya belanja modal pada tahun 2018 pak?
Jawab: Kemungkinan karena penghematan anggaran
6. Apa dampak dari menurunnya belanja modal pak?
Jawab: belanja modal ini kan tujuannya untuk fasilitas dikantor, aset, dll, kemungkinan kalau menurun belanja modal dari tahun sebelumnya, dampaknya peralatan-peralatan atau aset yang memang perlu kita ganti tidak bisa diganti, dan tetap memakai peralatan yang lama.
7. Apakah dana penghematan tersebut dialahkan ke anggaran yang lain pak?
Jawab: Memang penghematan dek. Tidak digeser ke kegiatan yang lain
8. Apa dampak dari meningkatnya belanja modal pak?
Jawab: Nilai aset dari instansi meningkat, dan fasilitas juga meningkat

